

**PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, PERAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH, PARTISIPASI ANGGARAN, DAN
AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KINERJA
PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

Oleh:

Roza Octalia

Pembimbing: M. Rasuli dan Volta Diyanto

Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru Indonesia

Email: roza.octalia@yahoo.com

*The Effect Of Commitment Organization, The Role Of Regional Financial
Management, Participation Budget, and Public Accountability
Towards The Performance Of Leadership Unit Device
Office Work Of Payakumbuh City*

ABSTRACT

This study aims to examine the Influence of Organizational Commitment, Role of Regional Financial Management, Budget and Public Accountability Participation on Performance Leadership. The object of this study conducted at SKPD Payakumbuh, consisting of 25 SKPD. The population of this study was a leader who works at SKPD Payakumbuh. Selection of the sample in this study was based on a purposive sampling method. Respondents in this study were the Head SKPD, Secretary of SKPD, Head of Sub Division of Finance, Head of Sub Division of Administration. The Method of collecting primary data was survey techniques and giving the questions to the respondents by questionnaires. From 100 questionnaires sent, there were 94 respondents who returned the questionnaire and which can be processed and analyzed. The processing and analysis of data were using multiple linear regression analysis with SPSS (Statistical Product and Service Solution) version 17. The results showed that organizational commitment had a significant effect on the performance of the leadership, the role of regional financial managers had a significant effect on the performance of the leadership, the participation had a significant effect on the budget performance management, and public accountability also had a significant effect on the performance of the leadership.

Keywords: Commitment, Role of Regional, Participation, Accountability, and Performance

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam

pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan

potensi daerah tersebut. Dengan pemberian otonomi daerah yang diatur dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah dimana kepala daerah bertanggung jawab atas DPRD.

Kinerja pegawai merupakan suatu prestasi dari tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau organisasi dalam melaksanakan pekerjaan pada suatu periode tertentu. Pada dasarnya kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis, **Indra (2006)**.

Kinerja Manajerial atau disebut dalam kegiatan-kegiatan manajerial, seperti perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi dan perwakilan (**Mahoney et al 1963**). Seorang pimpinan dituntut untuk dapat mengukur kinerja di organisasi yang dipimpinya. Tuntutan ini sesuai dengan dikeluarkannya PP nomor 58 tahun 2005 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pimpinan SKPD, adalah komitmen organisasi, peran pengelola keuangan daerah, partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik.

Komitmen dalam bekerja dapat mempengaruhi kinerja

organisasi maupun individu. Komitmen Organisasional (*organisational commitment*) adalah sikap yang mencerminkan sampai tingkat mana seseorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi.

Menurut **Robbins (2008)** komitmen organisasi adalah suatu tingkat keyakinan seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya berniat memelihara dan mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. Jadi keterlibatan kerja yang tinggi berarti pemihakan seorang karyawan pada pekerjaannya yang khusus, dan komitmen yang tinggi berarti pemihakan pada organisasi yang mempekerjakannya.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setiap daerah tentunya berbeda, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap daerah melakukan pengelolaan sendiri terhadap keuangannya.

Peran pengelola keuangan daerah memungkinkan tercapainya kinerja dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif, peran menunjukkan partisipasi seseorang dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Desentralisasi memberikan kesempatan pengelola keuangan daerah untuk mendorong kreativitas pengelola keuangan daerah. Individu yang terlibat dan diberi tanggung jawab dalam penyusunan anggaran akan bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan,

sehingga kinerja organisasi akan semakin tinggi.

Partisipasi penyusunan anggaran yaitu, proses dimana pembuat anggaran terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penentuan besar anggaran apabila informasi yang diberikan oleh bawahan tidak bias, maka anggaran yang dihasilkan dalam proses penyusunan anggaran akan dapat dicapai secara optimal.

Dalam proses penyusunan anggaran apabila para pimpinan SKPD ikut berpartisipasi untuk memutuskannya besar kemungkinan hasil yang akan diperoleh dari realisasi anggaran jauh lebih baik karena adanya tanggung jawab moril.

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut, **Mardiasmo (2011)**.

Akuntabilitas dalam artinya dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada publik dalam bentuk penyajian informasi keuangan organisasi.

Suatu pengukuran kinerja manajerial diperlukan untuk menilai prestasi dari organisasi yang dipimpinnya. Pengukuran manajerial pada instansi pemerintah daerah ini harus mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan tanggung jawab alokasi anggaran daerah. Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber daya yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dan apakah penggunaan dana telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan sebagaimana termuat dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, **Yusri (2012)**.

Adapun persoalan yang muncul dalam lingkungan pemerintah Payakumbuh adalah ada dari beberapa Dinas SKPD yang lamban dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013. Pencapaian PAD pada setiap SKPD merupakan penilaian kinerja buat pimpinan SKPD bersangkutan. Sampai minggu pertama Desember 2013 dari secara keseluruhan PAD Payakumbuh penyerapan anggarannya masih mencapai target 60% disini kita bisa melihat bagaimana kinerja Pimpinan SKPD masih lamban dalam merealisasikan anggaran.

Selain itu dikarenakan kurangnya kinerja SKPD masih ada masalah yang lain yang timbul, terlihat lagi adanya kinerja pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh yang mendapat teguran dari Walikotaanya, permasalahan sejumlah Pimpinan SKPD yang masih lamban mengaplikasikan program kerja pada instansinya, ada beberapa

SKPD yang serapan dana APBD pada tahun Anggaran 2014 sudah delapan bulan berlalu, masih ada yang mencapai 30% dari yang seharusnya sudah mencapai 60% sampai 70% , adapaun masalah lain yang terkait terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota tahun 2013, dimana pada tahun 2013 belanja daerah, belum maksimal.

Penyebab dari lemahnya serapan anggaran ini adalah tidak berjalannya dengan efektif program-program yang telah direncanakan dengan realisasi kegiatan yang ditetapkan. Jadi hal ini memberikan penilaian yang buruk terhadap kinerja pimpinan yang dilakukan oleh SKPD.

Mengingat pentingnya kinerja pimpinan terhadap suatu tujuan dan keberlangsungan suatu organisasi maka organisasi tersebut harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pimpinan. Setiap pimpinan dan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu memiliki kinerja yang baik, yaitu dengan mengelola anggaran secara ekonomis, efisien, efektif, bertanggung jawab dan benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat. Untuk itu diperlukan faktor-faktor yang baik dalam mendukung peningkatan kinerja pimpinan yaitu, Komitmen Organisasi, Pengelola Keuangan Daerah, Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu populasi dari penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah kota Payakumbuh.

Rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 1.) Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pimpinan SKPD; 2) Apakah peran pengelola keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pimpinan SKPD; 3.) Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja pimpinan SKPD; 4.) Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pimpinan SKPD

Tujuan Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh, 1) Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Payakumbuh; 2) Peran Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Payakumbuh; 3) Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Payakumbuh; 4) Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Payakumbuh.

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Kinerja Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Mahoney (1963) Kinerja Pimpinan merupakan kinerja individu dalam kegiatan-kegiatan manajerial seperti dari proses perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, supervisi, pengaturan staf (staffing), negosiasi dan representasi. Kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Dalam konteks organisasi pemerintah daerah, pengukuran kinerja pimpinan SKPD dilakukan untuk menilai seberapa baik pimpinan SKPD tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. Pengukuran kinerja pimpinan SKPD merupakan wujud dari *vertical accountability* yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan *horizontal accountability* pemerintah daerah yaitu kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya.

Komitmen Organisasional

Mowday (1982) adalah derajat yang mana karyawan percaya dan menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasi. Komitmen organisasi merupakan indentifikasi dan keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi.

Peran Pengelola Keuangan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pusat ke daerah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan ini berpengaruh terhadap manajemen keuangan daerah. Pengelola Keuangan Daerah diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola APBD daerah tersebut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan demikian desentralisasi pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan peran pimpinan pengelola keuangan daerah karena sistem tersebut memberikan kesempatan kepada pimpinan pengelola keuangan daerah untuk

turut berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Peran pengelolaan keuangan menurut **Halim dan Damayanti (2007)** adalah aktivitas manajemen sektor publik yang berkesinambungan dengan strategi perencanaan dan pengendalian dalam keuangan. Peran pengelola keuangan daerah memungkinkan tercapainya kinerja dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif, **Herminingsih (2009)**.

Partisipasi Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran-taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya, **Asikin (2010)**.

Partisipasi secara luas pada dasarnya merupakan proses organisasional, dimana para anggota organisasi terlibat dan mempunyai pengaruh dalam suatu pembuatan keputusan yang berkepentingan dengan mereka. Partisipasi dalam konteks penyusunan anggaran merupakan proses dimana para individu yang kinerjanya dievaluasi dan memperoleh penghargaan berdasarkan pencapaian anggaran, terlibat dan mempunyai pengaruh

dalam penyusunan target anggaran, Ariyanto (2013).

Akuntabilitas Publik

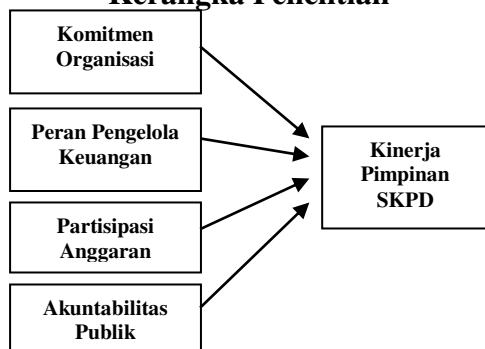
Menurut Mardiasmo (2002), laporan keuangan pemerintah dapat dipakai untuk menilai akuntabilitas pemerintahan. Menurut Putra (2013), Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Salah satu faktor yang dapat mengukur kinerja adalah dengan melakukan pengukuran terhadap anggaran, yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Model Penelitian

Dalam rangka meneliti pengaruh Komitmen Organisasi, Peran Pengelola Keuangan Daerah, Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Pimpinan SKPD Kota Payakumbuh dibangun model regresi berganda seperti berikut:

Gambar 1

Kerangka Penelitian



Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2012:93). Berdasarkan model penelitian di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

- H₁:Komitmen Organisasi Berpengaruh terhadap Kinerja Pimpinan SKPD
- H₂:Peran Pengelola Keuangan Daerah Berpengaruh terhadap Kinerja Pimpinan SKPD
- H₃:Partisipasi Penyusunan Anggaran Berpengaruh terhadap Kinerja Pimpinan SKPD
- H₄:Akuntabilitas Publik Berpengaruh terhadap Kinerja Pimpinan SKPD

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan yang bekerja di Dinas dan Badan lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh yang berjumlah 25 SKPD. Pemilihan sampel penelitian ini didasarkan pada metode *Purposive Sampling*. Responden dari penelitian ini adalah pejabat eselon II, III dan IV di Dinas dan Badan Kota Payakumbuh.

Responden dalam penelitian ini para pimpinan yang melaksanakan fungsi yang terkait langsung dalam pengelolaan keuangan daerah: 1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; 2) Sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah; 3) Kepala Sub Bagian Keuangan; 4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dimana data tersebut diperoleh

secara langsung dari responden itu sendiri, serta data tersebut dikumpulkan dan diperoleh dengan cara mendatangi langsung responden dengan menggunakan metode survey.

Data tersebut diperoleh melalui kuisioner yang berupa beberapa pertanyaan secara terstruktur, dimana respondennya dibatasi dalam memberikan jawaban pada alternatif tertentu.

Teknik Analisis Data:

1. Uji Validitas
2. Uji Realibilitas
3. Uji Normalitas
4. Uji Asumsi Klasik
5. Analisis Regresi Linier Berganda
6. Uji Simultan (F)

Uji Hipotesis

Untuk melakukan pengujian hipotesis secara parsial digunakan Uji t. Uji t bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Adapun prosedur pengujiannya adalah setelah melakukan perhitungan terhadap t hitung, kemudian membandingkan nilai t hitung dengan t table dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika suatu pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan suatu yang dapat diukur oleh kuisioner tersebut (Sugiyono,

2012:239). Pada penelitian ini uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing pertanyaan dengan total skor pertanyaan.

Dimana validitas data diukur dengan membandingkan r hitung dan r table. Hasil penelitian ini didapat nilai r hitung dari tiap item pertanyaan lebih besar dari r table yang berarti bahwa data dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk menguji konsistensi jawaban reponden. Suatu kuisioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian ini menggunakan metode statistik *Cronbach Alpha* dengan nilai sebesar 0,6. Semakin dekat *Cronbach Alpha* dengan 1, semakin tinggi keandalan konsistensi internal (Sekaran, 2006:177).

Dari hasil reliabilitas masing-masing instrumen diketahui nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6 yang berarti bahwa kuisioner yang digunakan sebagai indikator dari setiap variabel yang terdiri dari variabel komitmen organisasi, peran pengelola keuangan, partisipasi anggaran, akuntabilitas publik dan kinerja pimpinan adalah reliabel atau dapat dipercaya.

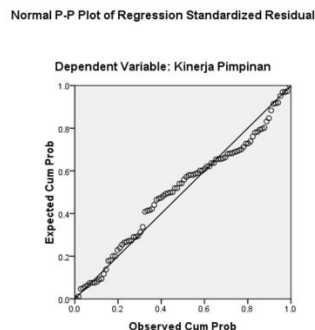
Hasil Uji Normalitas

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi normalitas data dilakukan melalui analisis statistik yang dapat dilihat melalui *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S, apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 atau 5 persen

maka data terdistribusi secara normal. Berdasarkan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh Asymp.sig. tiap variable lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Deteksi normalitas juga dapat dilihat dengan Kurva Normal P-Plot. Dengan dasar pengambilan keputusan adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi mengikuti asumsi normalitas. Sedangkan jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2011).

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas Metode
Grafik P-P Plot



Sumber :Hasil Pengolahan Data
SPSS

Normal P-Plot diatas menunjukkan bahwa data menyebar melalui dan mendekati garis diagonal sehingga dikatakan data berdistribusi normal.

Hasil Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independennya. Metode untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat pada *tolerance value* atau *variance inflammatory factor* (VIF). Batas *tolerance value* adalah 0,10 atau nilai VIF adalah 10. Jika VIF >10 dan nilai Tolerance < 0.10, maka terjadi multikolinieritas tinggi antar variabel bebas dengan variabel bebas lainnya.

Dari hasil olah data penelitian ini diperoleh perhitungan hasil analisis data nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan tolerance > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

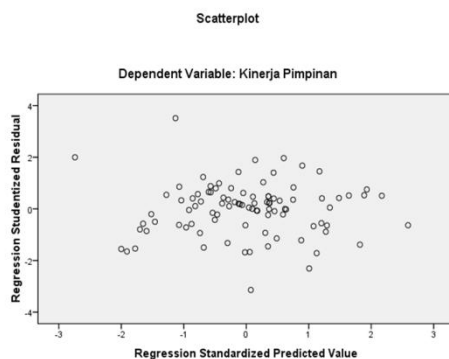
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah adanya ketidaksamaan varian dari residual antara satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dikatakan homoskedastisitas. Apabila varian tidak sama, disebut heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas dalam model persamaan regresi ini dilakukan dengan metode *Glejser Test*, yaitu dengan cara meregresikan nilai *absolute* residual terhadap variabel inpedenden, sehingga dapat diketahui ada tidaknya derajat kepercayaan 5%. Jika nilai signifikansi > 0.05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi < 0.05, maka terjadi heteroskedastisitas, (Ghozali, 2011).

Dari hasil olah data penelitian ini diperoleh nilai signifikan p-value setiap variabel independen lebih dari 0,05 maka dikatakan data penelitian terbebas dari gejala heterokedastisitas.

Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatterplot* dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jika ada titik pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. *Scatterplot* pada penelitian ini terlihat pada gambar berikut:

Gambar 3
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber :Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan program SPSS versi 17, maka diperoleh hasil persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut:

Tabel 1

Hasil Analisis Regresi Berganda Secara Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	.453	.393		
Komitmen Organisasi	.252	.101	.219	2.488	.015
Peran Pengelola Keuangan Daerah	.208	.099	.228	2.102	.038
Partisipasi Anggaran	.200	.090	.220	2.228	.028
Akuntabilitas Publik	.218	.091	.225	2.403	.018

a. Dependent Variabel:
Kinerja Pimpinan

Sumber :Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil perhitungan program SPSS tersebut, maka diperoleh persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = 0,453 + 0,252X_1 + 0,208X_2 + 0,200X_3 + 0,218X_4$$

Keterangan:

- Y = Kinerja pimpinan SKPD
- X₁ = Komitmen Organisasi
- X₂ = Peran Pengelola Keuangan
- X₃ = Partisipasi Anggaran
- X₄ = Akuntabilitas Publik
- e = Faktor pengganggu diluar model

Hasil Uji F

Makan hasil perhitungan program SPSS versi 17, maka

diperoleh hasil persamaan regresi berganda sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Secara Simultan(F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16.824	4	4.206	19.458	.000 ^a
	Residual	19.238	89	.216		
	Total	36.062	93			

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas publik, Komitmen organisasi, Partisipasi anggaran, Peran pengelolaan keuangan

b. Dependent Variable: Kinerja Pimpinan

Sumber :Hasil Pengolahan Data SPSS

F tabel dapat diperoleh sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 F \text{ tabel} &= n - k - 1 ; k \\
 &= 94 - 4 - 1 ; 4 \\
 &= 91 ; 4 \\
 &= 2,47
 \end{aligned}$$

Keterangan

n : jumlah sampel

k : jumlah variabel bebas

1 : konstan

Dengan demikian diketahui F hitung (19.458) > F tabel (2.47) dengan Sig. (0,000) < 0,05. Artinya adalah bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pimpinan.

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama dari penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pimpinan.

Tabel 3
Hipotesis Pertama

t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.	Keterangan
2.488	1.986	0.015	Ha ₁ diterima

Sumber:Hasil Pengolahan Data SPSS

Dari tabel tersebut diketahui nilai t_{tabel} sebesar 1.986 pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan uji regresi, diketahui nilai t_{hitung} variabel kinerja pimpinan sebesar 2.488 dengan signifikansi 0.015. Dengan demikian t_{hitung} (2.488) > t_{tabel} (1.986) dengan signifikansi (0.015) < (0.05). Jadi dapat disimpulkan bahwa **Ha₁ diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja pimpinan SKPD Kota Payakumbuh.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua dari penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh peran pengelola keuangan terhadap kinerja pimpinan.

Tabel 3
Hipotesis Kedua

t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.	Keterangan
2.102	1.986	0.038	Ha ₂ diterima

Sumber :Hasil Pengolahan Data SPSS

Dari tabel tersebut diketahui nilai t_{tabel} sebesar 1.986 pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan uji regresi, diketahui nilai t_{hitung} variabel kinerja pimpinan sebesar 2.102 dengan signifikansi 0.038. Dengan demikian t_{hitung} (2.102) > t_{tabel} (1.986) dengan signifikansi (0.038) < (0.05), jadi dapat disimpulkan bahwa **Ha₂ diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa peran pengelola keuangan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja pimpinan.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah apakah terdapat

pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja pimpinan.

Tabel 4
Hipotesis Ketiga

t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keterangan
2.228	1.986	0.028	Ha ₃ diterima

Sumber :Hasil Pengolahan Data SPSS

Dari tabel tersebut diketahui nilai t_{tabel} sebesar 1.986 pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan uji regresi, diketahui nilai t_{hitung} variabel kinerja pimpinan sebesar 2.228 dengan signifikansi 0.028. Dengan demikian t_{hitung} (2.228) > t_{tabel} (1.986) dengan signifikansi (0.028) < (0.05). Jadi dapat disimpulkan bahwa **Ha₃ diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja pimpinan.

Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat dari penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja pimpinan.

Tabel 5
Hipotesis Keempat

t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keterangan
2.403	1.986	0.018	Ha ₄ diterima

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Dari tabel tersebut diketahui nilai t_{tabel} sebesar 1.986 pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan uji regresi, diketahui nilai t_{hitung} variabel kinerja pimpinan sebesar

2.403 dengan signifikansi 0.018. Dengan demikian t_{hitung} (2.403) > t_{tabel} (1.986) dengan signifikansi (0.018) < (0.05). Jadi dapat disimpulkan bahwa **Ha₄ diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja pimpinan.

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan, pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pimpinan. Artinya semakin tinggi komitmen organisasi maka semakin tinggi kinerja pimpinan Kota Payakumbuh. Pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa peran pengelola keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pimpinan. Artinya semakin tinggi peran pengelola keuangan daerah maka semakin tinggi kinerja pimpinan Kota Payakumbuh. Pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pimpinan. Artinya semakin tinggi partisipasi anggaran maka semakin tinggi kinerja pimpinan Kota Payakumbuh. Pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pimpinan. Artinya semakin tinggi akuntabilitas publik maka semakin tinggi kinerja pimpinan Kota Payakumbuh.

Saran

Dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada, maka disarankan untuk penelitian yang akan datang memperhatikan hal-hal berikut:

1. Bagi penulis untuk masa yang akan datang dalam mengisi kuisioner sebaiknya responden di damping langsung oleh peneliti agar informasi yang didapatkan responden lebih tepat.
2. Bagi akademis, penelitian ini dapat dijadikan sumber pembelajaran dan referensi bagi akademis yang ingin mempelajari dan memahami tentang hal-hal yang mempengaruhi kinerja pimpinan.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat di jadikan pedoman dalam pengembangan kinerja pimpinan SKPD sehingga kinerja pemerintah dapat berjalan baik dan menjadi pembelajaran kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Arfan, M. 2014. *Pengaruh Komitmen Organisasional dan Peran Manajer Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi pada Pemerintah Kabupaten Gowa)*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi.

Astini, Ni Kadek. 2014. *Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Kinerja Manajerial SKPD Di Kabupaten Klungkung*. Bali: Universitas

Pendidikan Ganesha Singaraja.

Asikin, Nur. 2010. *Pengaruh Partisipasi Dalam Anggaran, Motivasi Kerja dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Manajerial SKPD Pemerintah Kota Tanjung Pinang*. Tanjung Pinang: Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Bangun, Andarias. (2009). *Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang)*. Tesis Universitas Sumatera Utara Medan.

Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta

Della, Praniti Ni Wayan. 2015. *Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Akuntabilitas Publik, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Kinerja Manajerial SKPD Kabupaten Gianyar*. Jurnal. Buleleng: Universitas Pendidikan Ganesha.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate*

- dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hazmi, Yusri. 2012. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintahan Kota Lhoksumawe, Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Kota Lhoksumawe*. Aceh: Politeknik Negeri Lhoksumawe.
- Harahap, Siti Englan Nauli (2012). *Pengaruh komitmen organisasi dan peran manajer pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.
- Herminingsih. 2009. "Pengaruh Partisipasi Anggaran dalam Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah". Tesis Tidak Dipublikasikan, Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mahoney, T. A, Jerdee and S.J Carroll. 1963. *Development of Managerial Performance. A research Approach* . Cincinnati. Ohio: South Western Publisng. Co.
- Nur, Kurniawan Muhammad Rizki. 2011. *Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Organisasi Publik*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Putra, D. 2013. *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)*. Skripsi. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Salemba Empat.
- Putri, Natalia Dewinda. 2010. *Pengaruh Komitmen Organisasional dan Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi pada Kabupaten Tegal)*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Ramandei, Pilipus. 2009. *Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja*

Perangkat Daerah Kota Jayapura). Tesis. Semarang: Program Studi Magister Akuntansi.

Robbins, Stephen P. Dan Judge, Timothy A. 2009. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Solina, Meria. 2014. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial pada SKPD kota Tanjung Pinang*. Tanjung Pinang: Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business*. Jakarta: Salemba Empat.

Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasi*, Yogyakarta: Andi.